

## Perempuan dan Lahan Gambut

### Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Lahan Gambut

### Artikel

Membumikan Ekofeminisme dalam Restorasi Gambut: Kebijakan, Aksi, dan Tantangan

*Myrna Asnawati Safitri*

Perempuan Bertarung dengan Api di Lahan Gambut: Pengalaman Perempuan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau

*Catharina Indirastuti*

Ketika Purun Menjauh: Pengalaman Perempuan di Kawasan Gambut Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

*Enik Maslahah*

Tanaman Purun dan Realita Pahit Perjuangan Perempuan di Lahan Gambut

*Taqiuddin Ibnu Syihab, Yustina Ambarini Murdiningrum, Lukas Rumboko Wibowo*

Aksi Perempuan Fasilitator Desa dalam Revitalisasi Ekonomi Kelompok Perempuan di Desa Gambut: Studi Kasus 3 Desa di Kalimantan Tengah

*Nur Iman Subono, Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu*

Diterbitkan oleh:

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan  
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)**

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,  
email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

## PENDIRI

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

## DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

## DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

## DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)  
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

## MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)  
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)  
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)

Dr. Bagus Takwin (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)

Ikhaputri Widiyanti, M. Si. (Filsafat dan Feminisme, Universitas Indonesia)

Elisabet Kuswijayanti M.Si. (Ekologi dan Gender)

Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

## REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

## SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

## REDAKSI

Dewi Komalasari

## SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah

Andri Wibowo

## DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

## ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

Telp./Fax (021) 2270 1689

E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)

[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

## WEBSITE:

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

[indonesianfeministjournal.org](http://indonesianfeministjournal.org)

Cetakan Pertama, Februari 2020

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Lahan Gambut/ *Women and Peatlands* ..... iii

### Artikel

- Membumikan Ekofeminisme dalam Restorasi Gambut: Kebijakan, Aksi, dan Tantangan/ *Manifesting Ecofeminism in Peatland Restoration: Policies, Actions, and Challenges* ..... 1-12  
*Myrna Asnawati Safitri*
- Perempuan Bertarung dengan Api di Lahan Gambut: Pengalaman Perempuan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau/ *Women Fighting Peatland Fire: Rural Women's Experiences in Central Kalimantan and Riau Provinces* ..... 13-24  
*Catharina Indirastuti*
- Ketika Purun Menjauh: Pengalaman Perempuan di Kawasan Gambut Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan Selatan/ *Being Away from Purun: Women's Experiences in Peatland Area of Hulu Sungai Utara, South Kalimantan* ..... 25-35  
*Enik Maslahah*
- Tanaman Purun dan Realita Pahit Perjuangan Perempuan di Lahan Gambut/ *Purun and The Bitter Realities of Women's Struggle in Peatland Areas* ..... 37-45  
*Taqiyuddin Ibnu Syihab, Yustina Ambarini Murdiningrum, Lukas Rumboko Wibowo*
- Aksi Perempuan Fasilitator Desa dalam Revitalisasi Ekonomi Kelompok Perempuan di Desa Gambut: Studi Kasus 3 Desa di Kalimantan Tengah/ *Women Village Facilitator Action on Economic Revitalization of the Women's Group: A Case Study in 3 peatland villages, Central Kalimantan* ..... 47-61  
*Nur Iman Subono, Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu*

# Perempuan dan Lahan Gambut

## *Women and Peatlands*

Indonesia memiliki lahan gambut dengan luas mencapai 22,5 juta hektar. Ia menyumbang 47% luas lahan gambut di wilayah tropis dan merupakan negara dengan lahan gambut terluas di Asia Tenggara. Oleh sebab itu keberadaan lahan gambut di Indonesia memiliki arti penting bagi kelestarian lingkungan secara global. Sayangnya, wacana seputar lahan gambut masih muncul terbatas pada situasi tertentu seperti saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*). Wacana lahan gambut yang muncul pun umumnya berfokus pada persoalan ekologi dan ekonomi, padahal keberadaan lahan gambut memiliki dimensi luas, baik dari segi sosial, budaya, politik, bahkan dalam dimensi keadilan gender. Dengan luasnya kawasan lahan gambut di Indonesia, maka jelas bahwa lahan gambut memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya penduduk yang hidup di sekitar kawasan lahan gambut, termasuk di dalamnya kaum perempuan.

Persoalan lahan gambut sebagai persoalan lingkungan secara global telah cukup lama dibahas, setidaknya sejak diadopsinya *the Ramsar Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat* (Konvensi Ramsar) di kota Ramsar, Iran, pada tahun 1971. Konvensi Ramsar telah menekankan pentingnya pencegahan kerusakan, pencegahan hilangnya lahan basah, serta pentingnya pelestarian lahan basah sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Ramsar pada tahun 1991. International Union for Conservation of Nature (IUCN) menyebutkan lahan gambut sebagai ekosistem bumi yang sangat berharga karena fungsinya dalam pelestarian keragaman hayati, sebagai sumber air, pencegahan banjir, dan untuk mengatasi perubahan iklim.

Ekofeminisme secara umum melihat akar dari kerusakan terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan sebagai akibat dari dominasi patriarki. Sebagaimana pandangan Karen J. Warren, cara pandang patriarki yang hierarkis dan opresif telah menindas alam dan perempuan. Kerusakan kawasan lahan gambut di Indonesia telah terjadi sejak zaman Orde Baru seperti salah satunya adalah *Rice Mega Project* yang mengubah lahan gambut di Kalimantan menjadi lahan persawahan. Pembangunan yang agresif dan juga bencana seperti kebakaran lahan dan hutan yang telah berjalan selama puluhan tahun tersebut telah berakumulasi dan menjadi warisan persoalan kawasan lahan gambut di Indonesia yang kita hadapi hingga hari ini.

Karhutla besar yang terjadi di Indonesia pada medio 2015 merupakan peringatan dan penanda penting atas ancaman terhadap kawasan lahan gambut di Indonesia. Hal ini ditandai dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016. BRG merupakan sebuah lembaga non-struktural di bawah Presiden yang diberi mandat untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kawasan lahan gambut di tujuh provinsi, yaitu: Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Papua. Konsep restorasi lahan gambut yang dijalankan oleh BRG mengakui bahwa pemulihan tanah tidak dapat dilakukan hanya dalam dimensi ekologis-geologis, tetapi juga dalam dimensi pemulihan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem lahan gambut. Konsekuensinya maka kaum perempuan juga harus menjadi penerima manfaat dan sekaligus agen dalam proses restorasi tersebut.

Perempuan memiliki kepentingan yang besar akan kelestarian lingkungan. Maria Mies dan Vandana Shiva, pemikir dan aktivis ekofeminisme, berargumen bahwa perempuan memiliki kepentingan yang besar terhadap kelestarian lingkungan. Hal

ini disebabkan oleh peran gender yang dibebankan kepada perempuan dalam pengasuhan dan pengelolaan kehidupan sehari-hari. Sehingga, agar dapat memberikan nutrisi yang cukup bagi anak dan/atau keluarga, memperoleh air yang bersih, dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya, maka perempuan memiliki kepentingan akan ketersediaan dan kelestarian sumber daya alam seperti air, udara, lahan, serta flora dan fauna.

Kaum perempuan yang hidup di kawasan lahan gambut merupakan gambaran yang jernih tentang hubungan antara kerusakan lingkungan dan akibatnya terhadap perempuan. Salah satu budaya dan ekonomi lokal di kawasan lahan gambut di Kalimantan adalah anyaman purun (purun adalah sejenis rumput yang tumbuh di lahan gambut dan sering digunakan sebagai bahan anyaman). Keterampilan menganyam purun umumnya dilakukan oleh perempuan, dan dilakukan di sela-sela waktu peran pengasuhan di dalam rumah tangga atau keluarga. Rusaknya lahan gambut menyebabkan hilangnya purun yang tumbuh bebas di sekitar desa. Ketika *purun* tidak lagi tumbuh di sekitar desa, maka perempuan pengrajin purun harus mencari purun jauh keluar desa, atau harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli purun untuk bahan baku pembuatan anyaman.

Bencana karhutla di kawasan lahan gambut telah menyebabkan kerugian ekonomi dan trauma terhadap penduduk. Perempuan adalah kelompok yang merasakan dampak langsung karhutla dalam kehidupan sehari-hari, seperti keringnya sumber air, rusaknya kebun, dan hilangnya sumber daya hayati lokal seperti ikan. Namun demikian, program-program pencegahan karhutla masih cenderung mengabaikan perempuan. Padahal ketika kebakaran terjadi, perempuan juga turut memadamkan api baik di lahan perkebunan maupun di pemukiman. Perempuan juga harus memikirkan dampak lanjutan dari karhutla terhadap kehidupan keluarga. Misalnya, kaum perempuan harus mencari cara mencegah asap masuk ke dalam rumah, atau merawat anggota keluarga yang sakit akibat asap ketika terjadi karhutla.

Pengalaman kerusakan lahan gambut dan akibatnya terhadap masyarakat dan perempuan menguatkan argumen ekofeminis seperti Ynestra King. King berpandangan bahwa kerusakan dan/atau penindasan yang terjadi terhadap manusia berakar dari relasi yang hierarkis dan timpang. Sebagaimana relasi kuasa yang timpang antara laki-laki terhadap perempuan, akibat yang kita rasakan dari rusaknya kawasan lahan gambut, karhutla, bencana asap, dan lainnya, juga menggambarkan relasi kuasa dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut selama ini.

Namun, ekofeminisme tidak berhenti pada argumen akan keterkaitan antara eksploitasi terhadap alam dengan dominasi terhadap perempuan. Ekofeminisme juga melihat agensi perempuan dalam memulihkan dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengalaman perempuan fasilitator desa di Desa Peduli Gambut memperlihatkan keberdayaan diri yang politis perempuan untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam proses restorasi gambut. Ekofeminisme menawarkan perubahan dalam cara pandang manusia yang superior terhadap alam melalui kacamata keadilan gender. Ajakan yang sama diajukan melalui pengetahuan yang dihadirkan dari pengalaman kaum perempuan, serta upaya mereka untuk memulihkan dan memelihara lahan gambut, di dalam edisi Jurnal Perempuan kali ini. Selamat membaca!

(Atnike Nova Sigi)



---

Myrna Asnawati Safitri (Badan Restorasi Gambut dan Universitas Pancasila, DKI Jakarta, Indonesia)

**Membumikan Ekofeminisme dalam Restorasi Gambut: Kebijakan, Aksi, dan Tantangan**

*Manifesting Ecofeminism in Peatland Restoration: Policies, Actions, and Challenges*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 1-12, 24 daftar pustaka

Degradation of peatland ecosystems occurs as a result of excessive exploitation leading to peat drainage and fires. This was influenced by a masculinity perspective in resource tenure and utilization. Ecofeminism presents a different perspective on narratives and inter-relationships of human with nature, including the place of women in them. Injustice that befalls women occur due to unequal power relations in the control and utilization of resources in the peatland ecosystem. This paper discusses the Government of Indonesia's efforts to reduce gender injustice through Peatland Restoration's policy. Two policies are discussed here, namely the Social Safety Safeguard and Peat Cares Village Program. It is concluded that women's participation must be able to resolve the imbalance of power relations among women as well as between gender. This requires sufficient time and everlasting education.

Keywords: ecofeminism, power relation, peatland, peatland restoration.

Kerusakan ekosistem gambut terjadi akibat eksploitasi berlebihan sehingga menyebabkan kekeringan dan kebakaran. Hal ini dipengaruhi pandangan maskulinitas pada penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ekofeminisme hadir memberi cara pandang lain terhadap narasi dan relasi manusia dengan alam, termasuk tempat perempuan di dalamnya. Ketidakadilan yang menimpa perempuan terjadi karena relasi kuasa yang tidak seimbang dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya di ekosistem gambut. Tulisan ini mendiskusikan upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketidakadilan gender melalui kebijakan Restorasi Gambut. Terdapat dua kebijakan yang dibahas yaitu Kerangka Pengaman Sosial dan Program Desa Peduli Gambut. Disimpulkan bahwa partisipasi perempuan sejatinya juga harus mampu menyelesaikan ketidakseimbangan relasi kuasa antar perempuan selain antar gender. Untuk ini diperlukan waktu yang cukup serta edukasi yang terus-menerus.

Kata kunci: ekofeminisme, relasi kuasa, gambut, restorasi gambut.

---

Catharina Indirastuti (Kemitraan-Partnership for Governance Reform, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan)

**Perempuan Bertarung dengan Api di Lahan Gambut: Pengalaman Perempuan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau**

*Women Fighting Peatland Fire: Rural Women's Experiences in Central Kalimantan and Riau Provinces*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 13-24, 1 grafik, 9 daftar pustaka

Forest and land fire that repeatedly destroyed million hectares of peatland in Indonesia is a result of unsustainable peatland governance for many years. Rural women and men living in peatland have different experiences with forest and land fire. Intersectionality between gender

and class, geographical location, and ethnicity further add nuances to these different experiences. This article explores women experiences in fighting peat forest and land fire in 3 target villages of Peat Care Village Program led by Peat Restoration Agency in Central Kalimantan and Riau. Power network that women must endure and a priori on gendered roles and responsibilities weaken women's position in fighting peatland fire. Women do not have access to resources given to prevent and fight against forest and land fire, while in reality fire-fighting activities require women's involvement especially when it happened in their land or living space. Women experiences in facing peat forest and land fire is reflected using feminist political ecology approach to highlight the multiple impacts that women experience.

Keywords: forest and land fire, intersectionality, peatland villages, women's access.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang kali membakar jutaan hektar lahan gambut di Indonesia merupakan akibat dari tata kuasa dan tata kelola lahan gambut yang tidak berkelanjutan selama puluhan tahun. Perempuan dan laki-laki di wilayah gambut perdesaan memiliki penghayatan yang berbeda mengenai karhutla. Interseksionalitas antara gender dengan kelas, lokasi geografis, dan suku turut mewarnai perbedaan pengalaman yang dirasakan. Artikel ini menelusuri pengalaman perempuan dalam penanggulangan karhutla di 3 desa dampingan Badan Restorasi Gambut dalam Program Desa Peduli Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau. Jaringan relasi kuasa yang melingkupi kehidupan perempuan dan *a priori* atas peran dan tanggung jawab yang digenderkan melemahkan posisi perempuan menghadapi karhutla. Perempuan tidak memiliki akses atas sumber daya untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla, sementara aktivitas penanggulangan karhutla menuntut keterlibatan perempuan karena terjadi di ruang hidup perempuan. Pengalaman perempuan menghadapi karhutla direfleksikan dengan pendekatan ekologi politik feminis untuk melihat dampak berlapis yang dialami perempuan.

Kata kunci: kebakaran hutan dan lahan, interseksionalitas, desa gambut, akses perempuan.

---

Enik Maslahah (Badan Restorasi Gambut (BRG), Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan)

**Ketika Purun Menjauh: Pengalaman Perempuan di Kawasan Gambut Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan**

*Being Away from Purun: Women's Experiences in Peatland Area of Hulu Sungai Utara, South Kalimantan*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 25-35, 4 tabel, 10 daftar pustaka

Purun is a typical plant that grow in peatland area that has important functions for people living in peatland area. The availability of purun is now decreasing due to changes in land management and environmental destruction. Almost all of the plantation commodities in the peatlands area, management of peatlands in the forestry, agriculture, plantation and fisheries sectors apply exploitative and pragmatic methods, while ignoring environmental sustainability. Furthermore, environmental damage also occurs due to disasters such as forest and land fires that often occur in peatland areas in Indonesia. One of the damages happen to peatland area is the damage and scarcity of purun. As users and beneficiaries of purun, women become the affected group that face the impact of peatland destruction. This paper describes the experiences and efforts of women in peatland areas to restore land and restore the existence of purun in their villages.

Keywords: women and peatland, purun, peatland restoration.

Purun adalah salah satu tanaman khas yang hidup di kawasan lahan gambut yang memiliki fungsi bagi masyarakat di kawasan lahan gambut. Keberadaan purun saat ini mulai berkurang akibat perubahan tata kelola lahan dan kerusakan lingkungan. Sebagian besar komoditas perkebunan di kawasan lahan gambut, pengelolaan lahan gambut di sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, dan perikanan dikelola dengan cara eksploitatif dan pragmatis, sementara kurang menghiraukan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kerusakan lingkungan juga terjadi akibat bencana seperti kebakaran hutan dan lahan yang masih sering terjadi di kawasan lahan gambut di Indonesia. Salah satu kerusakan yang terjadi terhadap kawasan lahan gambut adalah kerusakan dan kelangkaan tanaman purun. Sebagai pengelola dan pemanfaat purun, perempuan menjadi kelompok terdampak yang menghadapi dampak kerusakan lahan gambut. Tulisan ini memaparkan pengalaman dan upaya perempuan di kawasan lahan gambut untuk merestorasi lahan dan mengembalikan keberadaan purun di desa mereka.

Kata Kunci: perempuan dan lahan gambut, purun, restorasi gambut.

<sup>1</sup>Taqiyuddin Ibnu Syihab, <sup>2</sup>Yustina Ambarini Murdiningrum, <sup>3</sup>Lukas Rumboko Wibowo (<sup>1,2</sup>Epistema Institute, <sup>3</sup>P3SEKPI, DKI Jakarta, Indonesia)

### Tanaman Purun dan Realita Pahit Perjuangan Perempuan di Lahan Gambut

*Purun and The Bitter Realities of Women's Struggle in Peatland Areas*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 37-45, 2 gambar, 21 daftar pustaka

This paper aims to examine the elimination process of traditional conservation that has been built for many years by women on peatlands. This article reveals the struggle and multiple burdens of women in conservation, to do reproductive and productive work in the midst of clashing interests in peatland area. Research conducted shows that there is a shift in the mode of production from subsistence toward exploitative hegemony by capitalistic interests, as a product of modern scientific knowledge. Corporations compete for peatland areas to accumulate endless capital which then threatens the purun and the purun weaving community of women. This has not only led to degradation of the purun ecosystem but also the loss of source of life and cultural identity for the purun weaving community. From an ecofeminist perspective, investment policies and regimes with minimum controls have systematically destroyed peat ecosystems, resulting in economic powerlessness and impoverishment of women.

Keywords: purun, women and natural resources, women and peatlands

Tulisan ini mengkaji proses penyingkiran terhadap konservasi tradisional yang telah terbangun secara bertahun-tahun oleh kaum perempuan di lahan gambut. Artikel ini mengungkapkan pergolatan dan multi beban perempuan dalam konservasi, melakukan pekerjaan reproduktif dan produktif di tengah-tengah semakin derasnya perebutan dan klaim kepentingan atas lahan gambut. Penelitian yang dilakukan memperlihatkan adanya pergeseran mode produksi dari subsistensi menuju ke arah eksploitatif yang terhegemoni oleh kepentingan yang kapitalistik, sebagai produk dari ilmu pengetahuan modern. Korporasi memperebutkan lahan gambut untuk akumulasi kapital yang menjadi ancaman bagi purun dan komunitas perempuan penganyam purun. Akibatnya, komunitas penganyam purun tidak hanya kehilangan sumber kehidupan dan ekosistem purun tetapi juga identitas budaya mereka. Perspektif ekofeminis memandang bahwa

kebijakan dan rezim investasi dengan kontrol minimum secara sistematis telah menghancurkan ekosistem gambut, yang mengakibatkan ketidakberdayaan ekonomi dan pemiskinan perempuan.

Kata kunci: purun, perempuan dan sumberdaya alam, perempuan dan lahan gambut

<sup>1</sup>Nur Iman Subono, <sup>2</sup>Andi Misbahul Pratiwi, <sup>2</sup>Abby Gina  
(<sup>1</sup>Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia & <sup>2</sup>Jurnal Perempuan, DKI Jakarta)

### Aksi Perempuan Fasilitator Desa dalam Revitalisasi Ekonomi Kelompok Perempuan di Desa Gambut: Studi Kasus 3 Desa di Kalimantan Tengah

*Women Village Facilitator Action on Economic Revitalization of the Women's Group: A Case Study in 3 peatland villages, Central Kalimantan*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 47-61, 1 tabel, 2 grafik, 17 daftar pustaka

Peatlands play an important role in the ecological and economic aspects. Peatlands degradation in various regions in Indonesia brings economic issues, especially for women. The involvement of women in the peatland restoration program as a strategy needs to be reviewed. This research focuses on the involvement of women in the peatland restoration as a village facilitator, mainly on aspects of economic revitalization. This research focuses in 3 Villages in Central Kalimantan Province, Jabiren Village, Tumbang Nusa Village, and Gandang Barat Village. The main question of this research is how are the actions, challenges, and strategies experienced by women as village facilitators in the Desa Peduli Gambut program. Based on in-depth interviews with relevant actors and literature studies, this research finds, 1) the economic revitalization program conducted by women village facilitators build the economic resilience of rural women communities and changes the gender relations; 2) women village facilitators faced structural and cultural obstacles in their action; 3) the program is also the part of political actions for peatlands preservation.

Keyword: women village facilitator, peatlands restoration, economic revitalization, power

Lahan gambut memainkan peran penting dalam aspek ekologi dan ekonomi. Degradasi lahan gambut di berbagai daerah di Indonesia membawa masalah ekonomi masyarakat, terutama bagi perempuan. Pelibatan perempuan dalam restorasi lahan gambut menjadi salah satu strategi yang patut ditinjau. Penelitian ini berfokus pada keterlibatan perempuan dalam restorasi lahan gambut sebagai fasilitator desa, terutama perannya pada revitalisasi ekonomi desa. Penelitian ini berfokus pada perempuan fasilitator desa di 3 desa di Provinsi Kalimantan Tengah yakni Desa Jabiren, Desa Tumbang Nusa, dan Desa Gandang Barat. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana tindakan, tantangan, dan strategi yang dialami oleh perempuan sebagai fasilitator desa dalam program Desa Peduli Gambut. Berdasarkan wawancara mendalam dengan aktor-aktor dan studi literatur yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa 1) program revitalisasi ekonomi yang dilakukan oleh perempuan fasdes membawa dampak terhadap ketahanan ekonomi perempuan pedesaan dan perubahan relasi gender di dalam keluarga; 2) perempuan fasilitator desa mengalami hambatan struktural dan kultural dalam aksinya; 3) program yang dikembangkan perempuan fasdes merupakan bagian dari aksi politik untuk pelestarian lahan gambut.

Kata kunci: perempuan fasilitator desa, restorasi lahan gambut, revitalisasi ekonomi, kekuasaan

## Tanaman Purun dan Realita Pahit Perjuangan Perempuan di Lahan Gambut

### *Purun and The Bitter Realities of Women's Struggle in Peatland Areas*

<sup>1</sup>Taqiyuddin Ibnu Syihab, <sup>2</sup>Yustina Ambarini Murdiningrum, <sup>3</sup>Lukas Rumboko Wibowo

<sup>1,2</sup>Epistema Institute, <sup>3</sup>Pusat Penelitian Sosial-Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI)  
Perumahan Kalibata Indah, Jl. Manggis B No. 18, RT.2/RW.6, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510

<sup>1</sup> kidalista@gmail.com, <sup>2</sup> yustina.murdiningrum@epistema.or.id, <sup>3</sup> lrumboko@yahoo.com

Kronologi Naskah: diterima 25 Februari 2020; direvisi 4 Maret 2020; diputuskan diterima 26 Maret 2020

#### Abstract

This paper aims to examine the elimination process of traditional conservation that has been built for many years by women on peatlands. This article reveals the struggle and multiple burdens of women in conservation, to do reproductive and productive work in the midst of clashing interests in peatland area. Research conducted shows that there is a shift in the mode of production from subsistence toward exploitative hegemony by capitalistic interests, as a product of modern scientific knowledge. Corporations compete for peatland areas to accumulate endless capital which then threatens the purun and the purun weaving community of women. This has not only led to degradation of the purun ecosystem but also the loss of source of life and cultural identity for the purun weaving community. From an ecofeminist perspective, investment policies and regimes with minimum controls have systematically destroyed peat ecosystems, resulting in economic powerlessness and impoverishment of women.

Keywords: purun, women and natural resources, women and peatlands

#### Abstrak

Tulisan ini mengkaji proses penyingkiran terhadap konservasi tradisional yang telah terbangun secara bertahun-tahun oleh kaum perempuan di lahan gambut. Artikel ini mengungkapkan pergulatan dan multi beban perempuan dalam konservasi, melakukan pekerjaan reproduktif dan produktif di tengah-tengah semakin derasnya perebutan dan klaim kepentingan atas lahan gambut. Penelitian yang dilakukan memperlihatkan adanya pergeseran mode produksi dari subsistensi menuju ke arah eksploitatif yang terhegemoni oleh kepentingan yang kapitalistis, sebagai produk dari ilmu pengetahuan modern. Korporasi memperebutkan lahan gambut untuk akumulasi kapital yang menjadi ancaman bagi purun dan komunitas perempuan penganyam purun. Akibatnya, komunitas penganyam purun tidak hanya kehilangan sumber kehidupan dan ekosistem purun tetapi juga identitas budaya mereka. Perspektif ekofeminis memandang bahwa kebijakan dan rezim investasi dengan kontrol minimum secara sistematis telah menghancurkan ekosistem gambut, yang mengakibatkan ketidakberdayaan ekonomi dan pemiskinan perempuan.

Kata kunci: purun, perempuan dan sumberdaya alam, perempuan dan lahan gambut

#### Pengantar: Kerusakan Lahan Gambut

Dengan luas lahan gambut sekitar 20-21 juta hektar (Page & Rieley 2016), Indonesia memiliki lahan gambut terbesar ketiga di dunia, terutama di wilayah tropis, setelah Amazon dan Congo Basin dengan estimasi luasan sekitar 8,2 % dari luas daratan (Xu et al. 2018). Sumatra dan Kalimantan sendiri memiliki lahan gambut seluas sekitar 13 juta hektar. Lahan-lahan gambut tersebut terletak di sekitar pantai dan sepanjang pantai timur Sumatra dan bagian selatan dan barat Kalimantan dengan derajat keasaman sekitar 3-5 Ph (Giesen & Sari 2018). Hutan rawa gambut memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi (Page et al. 1999). Hutan rawa gambut umumnya didominasi oleh jenis-jenis pohon lokal yang memiliki nilai ekonomis, misalnya ramin

(*Gonystylus bancanus*), meranti (*Shorea* spp.), nyatoh (*Palaquium* spp) dan jelutung (*Dyera polyphylla*). Di masa lalu, masyarakat menyadap getah jelutung (Sofiyudin et al. 2012). Jelutung dipromosikan sebagai salah satu jenis andalan rawa gambut pada saat era rehabilitasi rawa gambut (Tata et al. 2015). Selain tanaman berkayu, komoditas komersial lain yang tumbuh subur dan secara tradisional dimanfaatkan oleh masyarakat adalah purun (*Lepironia articulata*). Purun adalah tanaman gambut seratan yang juga mudah ditemukan negara-negara tetangga, seperti Thailand dan Malaysia (Goib et al. 2018).

Lebih dari tiga dekade wilayah-wilayah berlahan basah di Indonesia, seperti Sumatra dan Kalimantan telah ditebang, dikeringkan dan diubah menjadi perkebunan (Giesen & Sari 2018; Miettinen et al. 2016) oleh korporasi

maupun perkebunan skala kecil (Miettinen et al. 2016) atau dibiarkan terlantar dalam kondisi rusak (Giesen & Sari 2018; Miettinen et al. 2016). Hutan Tanaman Industri dan perkebunan sawit telah beroperasi dan memakan lahan rawa gambut seluas sekitar 3,1 juta hektar. Dampaknya adalah meningkatnya laju deforestasi selama periode 2007-2015 yakni sebesar 4,1 % (Miettinen et al. 2016). Korporasi kayu dan perkebunan sawit diyakini membawa kemakmuran, namun demikian pembangunan di lahan gambut memiliki dampak kerusakan ekologis seperti meningkatnya emisi secara signifikan, dan kebakaran lahan gambut yang menjadi penyebab utama menurunnya kualitas ekonomi dan kesehatan masyarakat (Giesen & Sari 2018).

Sebagai dampak dari pengelolaan lahan gambut skala besar untuk perkebunan sawit, tambang, dan Hutan Tanaman Industri tersebut, komunitas lokal yang selama ini menggantungkan hidupnya pada lahan gambut, telah terganggu. Tidak jarang kepentingan masyarakat lokal dianggap tidak kongruen dengan kepentingan entitas bisnis perkebunan skala besar dan tambang. Salah satu kepentingan komunitas lokal yang tinggal di dalam dan sekitar gambut, khususnya perempuan, adalah tanaman purun. Tanaman purun (*Lepironia articulata*) adalah sejenis rumput anggota suku teki-teki (Cyperaceae) yang tumbuh di paya dan rawa-rawa dan sering dimanfaatkan sebagai bahan anyaman berupa misalnya tikar, tas, alat-alat rumah tangga lainnya. Purun ini adalah salah satu sumber mata pencaharian yang signifikan di banyak pedesaan lahan gambut (Goib et al. 2018). Namun saat ini kelestarian tanaman purun terancam seiring dengan menyempitnya dan rusaknya lahan gambut. Akibatnya purun sebagai bagian dari simbol keberlanjutan, budaya dan relasi antara alam dan manusia yang hidup di kawasan lahan gambut, khususnya perempuan, semakin terancam punah.

Pengelolaan lahan gambut yang masif ekstraktif dan tidak memperhatikan keberlangsungan ekosistem gambut ini berakibat terdegradasi sekitar 6,6 juta hektar lahan gambut di Sumatra dan Kalimantan (Miettinen & Liew 2010). Kerusakan lahan gambut masih berlanjut walaupun pemerintah melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Untuk mengatasi isu ini, Pemerintah bahkan mendirikan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 2016. BRG menggunakan pendekatan 3R, yaitu *rewetting*,

*revegetation*, dan *revitalization* (Giesen & Sari 2018), untuk merestorasi seluas 2,49 juta hektar di tujuh provinsi prioritas selama lima tahun.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji proses penyingkiran rezim konservasi tradisional yang telah terbangun bertahun-tahun oleh komunitas perempuan. Kedua, menganalisis pergulatan perempuan dalam konservasi, memenuhi kebutuhan hidup dan menjalankan peran gandanya di tengah-tengah semakin derasnya perebutan dan klaim kepentingan atas lahan gambut<sup>1</sup>.

### Metodologi Penelitian

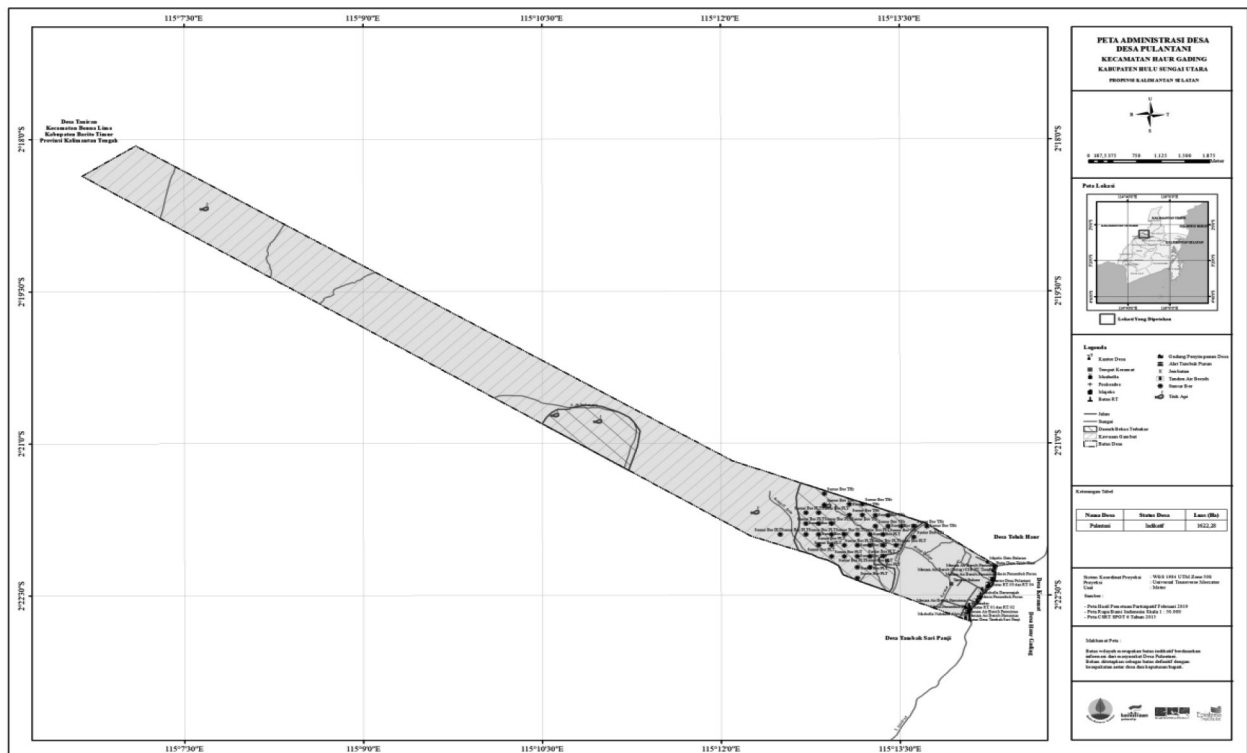
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 20 informan kunci yang terdiri dari: pengurus koperasi pengrajin purun, asosiasi pengrajin purun, kelompok pengrajin purun, fasilitator desa dari Badan Restorasi Gambut (BRG), dan beberapa warga desa termasuk para korban banjir. Selain wawancara, untuk melengkapi data penelitian, kami juga melakukan pengamatan lapangan (*field observation*), dan pengumpulan data sekunder lain, seperti data dan informasi dari berbagai literatur.

Penelitian ini menggunakan metode analisis sosial kritis. Kerangka kerja metode ini adalah mengedepankan *Critical Social Theory* (CST) sebagai landasan untuk mengungkapkan fakta dan kenyataan sosial yang ditemukan di lapangan, seperti di naskah literatur, media, dan kebijakan pemerintah (Leonardo 2004). Argumentasi penggunaan metode ini adalah kebalikan dari teori tradisional yang hanya mampu melakukan analisis deskriptif dari fenomena sosial. CST adalah teori kritik masyarakat yang mampu menjelaskan fenomena sosial dan mengevaluasi aspek normatif dari fenomena dalam suatu cara reflektif (Horkheimer 1972; Trejo-Mathys 2008; Abromeit 2013), dan mengidentifikasi agen atau aktor yang bertanggung jawab untuk proses transformasi sosial (Horkheimer 1972; Abromeit 2013). Pendek kata, metode ini berusaha untuk memahami, menganalisis, mengkritik, dan mendorong perubahan struktural, dominasi, eksploitasi dan ketidakadilan dari fenomena sosial-budaya, ekonomi dan politik (Bentz & Shapiro 1998).

Penelitian ini mengambil lokasi Desa Pulantani, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, Desa Pulantani adalah desa

yang terancam oleh proses industrialisasi dan investasi yang masif. Kedua, lahan gambut di desa tersebut merupakan tempat dimana purun banyak tumbuh dan secara tradisional telah menjadi gantungan hidup keluarga komunitas terutama perempuan yang tinggal di sana. Ketiga, di lokasi tersebut, peran pengrajin perempuan adalah penting—tidak hanya sebagai penyokong ekonomi rumah tangga—sebagai penerus tradisi anyaman purun, dan juga pemelihara kelestarian ekosistem gambut. Keempat, di lokasi tersebut juga tengah dipaksa mengalami transisi dan transformasi yang cepat baik secara lanskap biofisik maupun sosial yang didorong oleh pengembangan komoditas-komoditas seperti yang diistilahkan oleh Hery Santoso (2019) berbasis agroekosistem yang cepat dan intensif, seperti sawit. Kelima, lokasi tersebut merupakan area bagian dari Kawasan Perdesaan Kerajinan Berbasis Ekosistem Gambut.

Peta indikatif Desa Pulantani (dalam Gambar 1) merupakan hasil pemetaan partisipatif warga Desa Pulantani. Pemetaan partisipatif ini merupakan bagian dari program Desa Peduli Gambut dari BRG (Badan Restorasi Gambut)-Kemitraan yang dijalankan oleh Epistema Institute untuk pemetaan sosial dan JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) untuk pemetaan spasial. Pengambilan data dalam pemetaan partisipatif ini dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan kunci yang merupakan perwakilan warga desa; pengambilan titik koordinat batas desa dan pemanfaatan/penguasaan lahan dalam desa dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS) yang dilakukan bersama dengan perwakilan warga desa yakni sebanyak 3 kali *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan perwakilan warga desa.



Gambar 1. Peta Administrasi Desa Pulantani, Haur Gading (Pemetaan Partisipatif)

### Basis Klaim Ekofeminisme dalam Melihat Penindasan Perempuan dan Alam

Elaborasi diskursus relasi antara perempuan dan alam penting untuk diperdebatkan, baik dalam ilmu alam maupun ilmu sosial, mengingat masalah sosial memiliki keterkaitan dengan masalah lingkungan hidup secara ekologis dan secara sosial. Salah satu sebab adanya

masalah sosial seringkali berakar dari masalah ekologis (Sari et al. 2019). Ekofeminisme memandang bahwa ada hubungan yang melekat antara alam dan perempuan. Pemikiran awal yang mendiskusikan hubungan antara perempuan dan alam salah satunya adalah Sherry B. Orner, yang menyatakan bahwa alam dan perempuan selalu memiliki relasi dalam bentuk simbol-simbol budaya (Orner 1974).

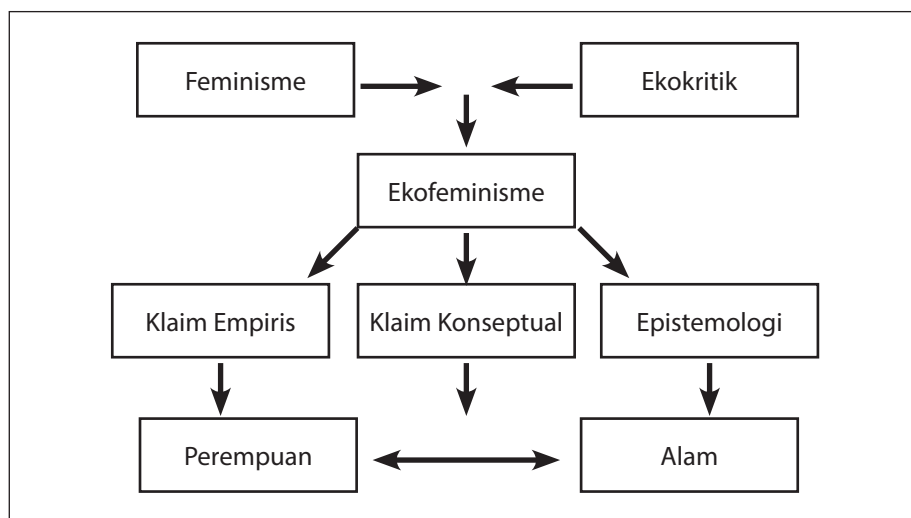
Ekofeminisme sebagai ilmu pengetahuan tentang manusia, mempelajari aspek biologis, sosial, dan budaya dari kehidupan manusia, serta perilaku dan hubungan manusia dengan entitas lain. Ekofeminisme sebagai alat konseptual mencoba membongkar masalah yang berkaitan dengan perempuan dan alam. Wacana ekofeminisme di Barat seiring dengan munculnya wacana ekologis seperti *deep ecology*, ekologi dangkal, dan ekokritik, baik dalam ilmu pengetahuan alam—cabang ilmu yang berurusan dengan dunia fisik, misalnya, fisika, kimia, dan astronomi—dan formasi diskursif lainnya. Sebagai istilah, ekofeminisme itu sendiri memperlihatkan pertemuan dua aliran teori besar, yaitu feminisme dan wacana ekokritikal. Feminisme tidak hanya membahas eksploitasi perempuan oleh laki-laki tetapi juga membahas bagaimana perempuan menjadi korban langsung degradasi alam karena hubungan yang dekat dan ketergantungan perempuan terhadap alam (Shiva 2010; 2012).

Istilah ekofeminisme menjawab pertanyaan di benak kita tentang saling keterkaitan hubungan antara perempuan dan alam. Beberapa ilmuwan lingkungan menolak hubungan antara perempuan dan alam (Ortner 1974), sementara yang lain menekankan kuatnya hubungan antara perempuan dan alam (Daly 1978). Koneksi perempuan dan alam umumnya didasarkan atas tiga karakter klaim, yaitu empiris, konseptual, dan epistemologis (Eaton & Lorentzen 2003).

Pertama, secara empiris dinyatakan bahwa dampak kerusakan lingkungan adalah perempuan. Singkatnya, klaim empiris ekofeminis mengkaji sosio-politik dan ekonomi struktur yang menyebabkan kehidupan perempuan menjadi miskin, adanya perampasan ekologis, dan ketidakberdayaan ekonomi (Eaton & Lorentzen 2003). Terjadi pergeseran mode produksi dari subsistensi menuju ke arah eksploitatif, dimana manusia mulai terhegemoni oleh kepentingan kapitalis yang umumnya menjadi produk dari perkembangan ilmu pengetahuan modern. Akibatnya, mewabahlah antroposentrisme dimana alam dijadikan objek dan manusia menjadi subjek yang mengeksploitasi alam seenaknya saja (Sari et al. 2019).

Kedua, klaim konseptual yang berfokus pada konstruksi masyarakat berdasarkan “hierarki dan dualisme” (Eaton & Lorentzen 2003), mengungkapkan ideologi patriarki sebagai akar penyebab dominasi terhadap perempuan dan eksploitasi alam (Sari et al. 2019; Sharnappa 2016).

Ketiga, klaim epistemologis yang berpusat pada pengetahuan tentang alam. Dalam perspektif ini, perempuan secara historis menjadi petani agraris (Sari et al. 2019; Daly 1978). Sehingga, perempuan mendukung pertanian berkelanjutan dan terbarukan. Selain itu, mereka digembar-gemborkan sebagai penyelamat alam. Bahkan, perempuan diinvestasikan dengan misi untuk melindungi, melestarikan, dan memelihara lingkungan (Daly 1978). Perspektif ekofeminisme, basis klaim, dan relasinya dalam konteks hubungannya antara perempuan dan alam dapat digambarkan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Ekofeminisme, Basis Klaim, dan Relasi antara Perempuan dan Alam

Sumber: Eaton & Lorentzen 2003

## Titik Awal Krisis Ekologis

"Ini apa? Sedotan dari *purun*? Oo...Amazing... Saya tertarik sekali untuk mengembangkan produk ini", ujarnya Pak Ted<sup>2</sup>. Perbincangan singkat tersebut terungkap manakala Epistema Institute melakukan sebuah diskusi sekaligus memamerkan berbagai produk hasil dari gambut, seperti madu, kopi dan kerajinan purun.

Ketertarikan Pak Ted, berbanding terbalik seratus delapan puluh derajat dengan entitas bisnis besar, birokrasi baik di pusat, sub-nasional dan lokal. Entitas-entitas ini cenderung menganggap purun bukanlah komoditas komersial yang memiliki nilai jual tinggi. Purun hanyalah komoditas rumahan, tidak penting, dan hanya cocok untuk komunitas lokal tradisional yang hanya sekadar bisa mendatangkan uang receh. Bahkan di awal-awal rezim investasi, terjadi pembukaan lahan gambut sekitar tahun 1960-an, tanpa ketertarikan terhadap potensi ekosistem lahan gambut, apalagi purun.

Pada masa awal rezim eksploitasi hutan dioperasikan, lahan gambut bukanlah lahan seksi bagi entitas bisnis kayu, maupun perkebunan. Entitas-entitas bisnis tersebut lebih tertarik untuk menjamah lahan-lahan mineral. Sebab, secara kalkulasi ekonomi, berbisnis di lahan mineral lebih efisien dan menguntungkan. Namun, seiring dengan semakin menipisnya areal-areal mineral, dan mulai terkuaknya potensi ekonomi yang tinggi dari lahan gambut, mulailah entitas bisnis tersebut melakukan ekspansi secara cepat. Lahan-lahan gambut pun sejak tahun 1980-an, mulai dipetak-petak oleh konsesi-konsesi besar. Lahan gambut dianggap sebagai komoditas alternatif untuk akumulasi kapital (Handoyo et al. 2018).

Beroperasinya entitas bisnis yang dibarengi oleh berbagai aktivitas non-legal yang dilakukan oleh beragam aktor telah berdampak pada terganggunya metabolisme ekosistem gambut. Pasar global lebih tertarik pada produk-produk berbasis sumberdaya alam, seperti hutan tanaman industri, sawit dan pertambangan, sehingga berdampak secara signifikan pada keberlanjutan ekosistem gambut. Munculnya krisis ekologis di ekosistem gambut pun bukan lagi sebagai sebuah asumsi dan kalkulasi prediktif, tetapi sebuah fakta empiris yang terjadi di beberapa tempat, termasuk di lokasi penelitian.

Menurut Ulrich Beck (1992) dalam bukunya *Risk Society Towards New Modernity*, ada tiga dampak nyata dari hadirnya korporasi ekstraktif bagi komunitas-komunitas yang tinggal di lahan gambut, yakni dampak

yang bersifat psikis, fisik dan sosial. Dampak psikis terjadi seperti rasa ketakutan bagi beragam komunitas, termasuk perempuan yang bergelut dengan purun untuk menghidupi keluarganya. Dampak fisik adalah keringnya sungai-sungai di musim kemarau yang biasanya dijadikan alat transportasi masyarakat ke berbagai wilayah dan juga banjir di musim penghujan yang merusak tanaman purun. Dampak sosial berupa munculnya potensi konflik lahan dengan beragam aktor, khususnya dengan perusahaan sawit dan hutan tanaman industri.

## Marginalisasi Purun dan Perempuan

Sejak ribuan tahun yang lalu ada beberapa komunitas masyarakat yang telah mendiami kawasan yang berlahan gambut seperti bangsa Komeri, Ogan, Melayu, Sakai, Bugis, Banjar, Dayak (Noorinayuwati & Saragih 2013), Dani, Asmat, Kamoro dan Korowai (Mongabay 2017). Mereka memiliki kearifan tersendiri dalam mengelola kawasan gambut agar tidak mendatangkan bencana ekologis maupun magis bagi mereka.

Masyarakat yang mendiami ekosistem gambut memiliki cara hidup yang unik, berbeda dengan yang hidup di daratan tanah mineral. Cara bercocok tanam komunitas-komunitas tersebut pun berbeda—bukan semata-mata karena lahannya berupa gambut dan bukan tanah. Praktik memulai musim tanam dengan membuka lahan dengan membakar dengan cara tertentu pun menjadi praktik umum pada budaya dan tradisi mereka. Praktik ini dipercaya mampu menurunkan kadar keasaman lahan, dimana abu bekas bakaran dan kapur bisa menjadi nutrisi tanaman pertanian yang dibudidayakan warga.

Selain faktor kesadaran ekologi dan pertimbangan ekonomi masyarakat lokal, eksistensi kawasan gambut yang dikelola oleh warga masyarakat relatif lebih lestari daripada yang dikelola oleh perusahaan seperti misalnya perkebunan sawit ataupun hutan tanaman industri. Hal ini disebabkan oleh sistem kepercayaan setempat yang memberikan perhatian khusus pada lahan gambut, yang menuntut mereka lebih menjaga gambut agar selamat dunia dan juga akhirat nantinya.

Dari penuturan informan kunci yang menjabat kepala desa, melalui kepercayaan masyarakat asli ini, hutan gambut mampu terjaga dan lestari ribuan tahun lamanya, tidak dieksploitasi secara berlebihan apalagi dirusak. Kepercayaan dan tradisi mereka memang mengizinkan untuk membakar lahan dalam membuka ladang *Pahaman* (sawah ataupun ladang) dan memperbolehkan

pengambilan kayu untuk membangun rumah atau sekadar menjualnya untuk kebutuhan hidup. Namun demikian, masyarakat dilarang untuk mengeksploitasi alam demi memperkaya diri.

Masyarakat Haur Gading menurut penuturan seorang warga yang tinggal di Haur Gading, diduga sudah mendiami daerah ini sejak zaman Kerajaan Negara Kuripan yang eksis di bagian Hulu Sungai Tabalong—sekarang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan—pada abad 14. Dalam perkembangannya, berdasarkan cerita legenda di Haur Gading tentang Pondok Datuk yang menjaga *hapau* (hutan), akhirnya mereka memeluk agama Islam yang dibawa oleh Kesultanan Banjar, dan mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Banjar, atau beberapa warga menyebut diri mereka sebagai Dayak Kampong yang berbahasa Banjar Hulu Sungai. Mereka tidak pernah terbukti merusak hutan yang ada di sana. Hutan gambut umumnya selalu terjaga baik. Kepercayaan akan adanya semacam tuah/kualat/kesialan jika merusak hutan mendampingi kehidupan mereka dalam mengelola gambut.

Kebakaran hutan hebat yang pernah melanda pada 1998 dan 2016 di Desa Pulantani, Haur Gading telah meluluhlantakkan hutan dan ekosistem gambut. Kebakaran tersebut menghancurkan hampir 80% kawasan hutan gambut.

Kami tidak pernah berprasangka buruk dengan menuduh warga desa yang melakukan pembakaran dengan skala masif, sebab keyakinan akan keberadaan kekuatan alam gaib yang dapat mencelakakan mereka jauh lebih kuat melekat dalam alam pikiran mereka daripada rayuan profit yang datang dari makelar perkebunan sawit. (Kepala Desa Pulantani 2019, wawancara 27 Juli)

Masyarakat Desa Pulantani, Haur Gading atau masyarakat Bugis di Muara Sugihan yang ingin memiliki ekonomi yang cukup baik, memilih berinvestasi sarang burung walet, daripada membongkar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan maupun tambang. Mereka percaya jika hal itu dilakukan seperti membongkar dan merusak hutan, dapat mendatangkan bencana bagi mereka. Ada semacam kutukan mistik dari penghuni alam lain yang mengancam diri mereka juga keluarganya, entah berupa wabah penyakit ataupun kematian tanpa ada sebab medis yang jelas (Wawancara & FGD 2019). Kepercayaan ini menjadi bagian tradisi penting terjaganya hutan gambut hujan tropis di Haur Gading dan juga hutan rawa gambut di Muara Sugihan, terutama di Desa Kuala Sugihan. Upaya masyarakat Haur Gading terutama komunitas perempuan dalam menjaga

kelestarian hutan rawa gambut ini menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan rezim konservasi tradisional yang berupa struktur, sistem, dan norma-norma pengelolaan rawa gambut berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem asli gambut selama bertahun-tahun secara turun temurun.

Tetapi dalam beberapa dekade terakhir ini rezim konservasi tradisional ini pelan tapi pasti telah tersingkirkan. Fakta menunjukkan bahwa setelah kebakaran hebat hutan Haur Gading di 1998, korporasi sawit masuk dari luar daerah ke kawasan *hapau*, untuk berinvestasi berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Aktivitas perkebunan sawit ini, menurut penuturan warga, menemui kegagalan dimana beberapa bibit sawit yang ditanam gagal tumbuh baik, banyak yang mati karena roboh dan sebagian tenggelam terendam banjir. Namun demikian, kanal-kanal yang dibuat untuk petak perkebunan sawit mampu membuat cadangan air yang tersimpan di dalam kubah-kubah gambut yang ada di *hapau* sedikit mengering, mengalir melalui kanal-kanal tersebut.

Mengeringnya air dan lahan gambut mengakibatkan kualitas tanaman purun menurun, padahal budaya mengelola purun bukan hanya menjadi tradisi bagi masyarakat Haur Gading, tetapi juga sekaligus sandaran ekonomi bagi kaum perempuan di sana. Tradisi menganyam *purun* telah ada sejak ratusan tahun lalu, sehingga keterampilan menganyam *purun* adalah hasil interaksi dari para pemukim dari kerajaan Kuripan, Negara Dipa, dan Negara Daha yang mendiami sisi barat daya Sungai Tabalong dengan ekosistem gambut di sana. Interaksi Manusia Haur Gading dengan ekosistem gambut yang luar biasa ini mampu menjaga kawasan hutan gambut ratusan tahun dan tetap lestari.

Sejak kemunculan bisnis ekstraktif batubara milik Adaro di hulu utara Sungai Tabalong dan perkebunan sawit di Kabupaten Tabalong pada 1990an, membuat kawasan Haur Gading dan sekitarnya terancam. Danau Panggang sebuah danau rawa gambut yang cukup luas di bagian hulu Sungai Tabalong mengalami perluasan karena debit air yang dimuntahkan oleh Sungai Tabalong ke area danau semakin membesar. Hal ini akibat keberadaan Tambang Batubara tersebut di sebelah timur laut Sungai Tabalong, dan rusaknya hutan gambut karena kebakaran yang dipicu pembukaan perkebunan sawit di bagian timur laut kawasan ini. Praktik bisnis ekstraktif ini mengurangi kemampuan daerah resapan air di hulu Sungai Tabalong, yang membuat area sekitar Danau Panggang, termasuk Haur Gading terancam tenggelam dan purun terancam rusak.

Di desa Pulantani, Kecamatan Haur Gading, purun ditanam oleh warga, ada patok-patok penanda batas kebun purun milik si A atau si B. Warga Desa Pulantani maupun warga luar Desa Pulantani yang hendak memanen purun di ladang Pulantani yang ditanam oleh warga, biasanya meminta izin untuk memanen dan memberikan kompensasi berupa sejumlah uang bergantung dengan jumlah purun.

Populasi pengrajin (penganyam) purun di Desa Pulantani masih stabil meskipun produksi berkurang karena berkurangnya tanaman purun. Kaum perempuan di desa ikut dalam kelompok pengrajin yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa dan bekerjasama dengan Fasilitator desa (Fasdes) dari BRG dan Kemitraan, yang bernama Iwan. Adanya kebutuhan purun untuk anyaman yang cukup tinggi, warga bersama Fasdes berniat untuk menambah luasan kebun purun baru milik kelompok pengrajinnya itu seluas 6 hektar.

Warga desa sebelah Desa Pulantani yaitu Desa Murung Panggang, Kecamatan Amuntai Selatan, membeli purun yang tumbuh di Desa Pulantani karena ladangnya sangat sedikit. Beberapa bahan baku purun didapatkan dari beberapa wilayah di Kalimantan Tengah. Warga desa, misalnya di Desa Murung Panggang, malas menanam purun karena maraknya pencurian purun. Pencurian terjadi karena tak banyak lagi purun yang bisa tumbuh subur di Murung Panggang. Ditambah tingginya kebutuhan bahan baku purun untuk anyaman.

Saat ini perempuan pengrajin Desa Pulantani sedang mengembangkan produk baru berbahan purun yaitu berupa sedotan. Sedotan purun ini bisa menambah jenis produk purun yang biasa mereka hasilkan. Dengan nilai jual yang relatif lebih tinggi dari produk-produk purun lainnya, diharapkan pengembangan usaha produksi sedotan purun bisa memotivasi para perempuan pengrajin untuk tetap menjaga kelestarian purun dan ekosistem gambut. Koperasi Pengrajin Anyaman Purun juga sudah dibentuk untuk dapat menyelesaikan seluruh siklus produksi secara lebih efisien, terutama proses pemanggangan dan juga pengeringan. Rumah pengering purun juga rencananya akan dibuat di Desa Banjang Kecamatan Banjang HSU. Rumah pengering ini diharapkan mampu menjadi perangkat yang mempermudah bukan hanya dalam proses penjemuran sedotan purun saja, akan tetapi juga meningkatkan beberapa komoditas ekosistem gambut lain yang ada di HSU seperti ikan asin, sale pisang, kerupuk ikan, tepung talipuk (biji teratai), sagu dan sebagainya.

Sebagai upaya menjaga kelestarian gambut, Badan Restorasi Gambut bekerjasama dengan Epistema

Institute memfasilitasi disusunnya peraturan bupati mengenai kawasan perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Desa Pulantani merupakan salah satu dari empat desa (Desa Murung Panggang, Tambak Sari Panji, Tuhuran, Pulantani) yang merupakan area bagian dari Kawasan Perdesaan Kerajinan Berbasis Ekosistem Gambut berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No. 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penetapan kebijakan kawasan perdesaan ini merupakan pedoman dalam penetapan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah untuk pengembangan desa-desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan tersebut.

### **Ketidakterdayaan Ekonomi Perempuan Penganyam Purun Akibat Kerusakan Ekologis**

Perempuan di Desa Pulantani, Haur Gading, saat ini menghadapi situasi yang sulit karena ekosistem rawa gambut yang menunjang habitat purun semakin terancam oleh berbagai aktivitas entitas bisnis ekstraktif. Eksistensi purun adalah penting sebab purun bukan hanya sebagai sumber ekonomi keluarga tetapi juga simbol budaya dan sekaligus tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun oleh para leluhur mereka. Hadirnya berbagai korporasi ekstraktif yang diikuti oleh semakin menyempitnya ruang hidup *purun*, memaksa sebagian dari pengrajin menjadi bagian dari alat produksi dengan bayaran rendah dan tanpa jaminan kesehatan yang memadai. Tantangan pengrajin berbasis purun saat ini adalah sulitnya mencari purun karena lokasinya semakin jauh.

Jika tidak ada perubahan kebijakan penyelamatan gambut, tanaman purun akan semakin langka dan prediksi akan terjadi migrasi tenaga kerja ke industri ekstraktif bisa terjadi. Terjadi proses pergeseran bentuk kerja perempuan penganyam purun, sehingga mereka tidak hanya kehilangan tradisi tetapi juga hak akses atas keadilan dan sumber daya alam. Budaya industrial modern memangsa tidak hanya tenaga kasar, tetapi juga identitas dan budaya mereka. Sesuai pendapat Sherry B. Orner (1974), ketergantungan perempuan pengrajin purun dengan lahan gambut dan dampak yang dirasakan akibat rusaknya habitat purun tersebut menyiratkan kuatnya hubungan antara perempuan dan alam.

Dalam hubungan antara perempuan pengrajin purun di Desa Pulantani dan ekosistem gambut tersebut nampak jelas bahwa koneksi perempuan dengan alam tersebut didasarkan pada beberapa klaim. Pertama,

adalah klaim epistemologis (Sari et al. 2019; Daly 1978), dimana perempuan pengrajin purun di Desa Pulantani secara historis diakui sebagai pendukung pemanfaatan lahan gambut secara berkelanjutan. Ketergantungan para perempuan pengrajin terhadap purun yang hanya tumbuh di ekosistem gambut yang masih bagus tersebut secara tidak langsung menguatkan peran mereka sebagai pelindung dan pelestari ekosistem gambut di tengah gempuran ekstraksi lahan gambut yang masif-eksploitatif.

Kedua, klaim empiris (Eaton & Lorentzen 2003), bahwa kerusakan ekosistem gambut di wilayah Haur Gading berdampak langsung pada perempuan pengrajin purun, berupa ketidakberdayaan ekonomi bahkan perampasan ekologis. Tidak hanya mereka mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku kerajinan purun, pendapatan mereka pun berkurang. Mereka terancam beralih profesi menjadi buruh perusahaan sawit dan tambang--yang belum tentu menjamin kesejahteraan dan keselamatan kerja mereka. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran mode produksi dari subsistensi menuju ke arah eksploitatif, dimana manusia mulai terhegemoni oleh kepentingan kapitalis.

## Kesimpulan

Hadirnya korporasi ekstraktif di wilayah Haur Gading berdampak pada penyingkiran rezim konservasi yang telah bertahun-tahun dijalankan oleh masyarakat Haur Gading, terutama kelompok perempuan. Mereka yang selama ini memanfaatkan rawa gambut sambil tetap memelihara kelestarian ekosistem, harus tergeser dengan pemanfaatan lahan gambut oleh korporasi ekstraktif.

Perempuan di Desa Pulantani, Haur Gading, saat ini menghadapi situasi yang sulit dimana ekosistem rawa gambut sebagai habitat purun terancam oleh berbagai aktivitas entitas bisnis ekstraktif. Purun bukan hanya sebagai sumber gantungan hidup tetapi juga simbol budaya dan sekaligus tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun oleh para leluhur mereka. Setidaknya ada tiga dampak nyata dari hadirnya korporasi ekstraktif bagi komunitas-komunitas yang tinggal di lahan gambut, yakni dampak yang bersifat psikis, fisik dan sosial. Dampak psikis terjadi seperti rasa ketakutan bagi beragam komunitas, termasuk perempuan yang bergelut di kesehariannya dengan purun memikirkan kelangsungan hidup keluarganya. Dampak fisik adalah keringnya sungai-sungai di musim kemarau yang biasanya dijadikan alat transportasi masyarakat ke berbagai wilayah, dan juga banjirnya *hapau* di musim

penghujan yang merusak purun. Dampak sosial berupa munculnya potensi konflik lahan dengan beragam aktor, khususnya dengan perusahaan sawit, tambang dan hutan tanaman industri.

Pengalaman perempuan di Desa Pulantani, Haur Gading tersebut menggambarkan adanya hubungan erat antara perempuan pengrajin purun dengan ekosistem gambut. Hubungan tersebut didasarkan atas dua karakter klaim, yaitu klaim epistemologis dan empiris. Hubungan antara perempuan pengrajin purun dengan alam dapat dijelaskan oleh klaim epistemologis, yaitu secara historis perempuan pengrajin purun diakui sebagai pelindung dan pelestari ekosistem gambut. Hubungan perempuan pengrajin purun dengan ekosistem gambut juga sesuai dengan klaim empiris, karena kerusakan ekosistem gambut di wilayah Haur Gading berdampak langsung pada perempuan pengrajin purun. Dampak tersebut muncul menjadi ketidakberdayaan ekonomi dan kerusakan ekologis. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerusakan purun dan upaya kaum perempuan untuk memelihara purun sebagai identitas sosial dan ekonomi masyarakat di lahan gambut merupakan bagian dari perjuangan perempuan di Desa Pulantani dalam mempertahankan kelestarian ekosistem gambut di tengah ekspansi korporasi mengancam kelestarian lahan gambut.

## Daftar Pustaka

- Abromeit, J 2013, *Max Horkheimer and the foundations of the Frankfurt School*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Bentz, V. M., & Shapiro, J. J 1998, *Mindful Inquiry in Social Research*, Sage Publications, Thousand Oaks.
- Beck, U 1992, *Risk Society towards New Modernity*, Sage Publication.
- Eaton, H. & Lorentzen, L. A. (ed.) 2003, *Ecofeminism and globalization exploring culture, context, and religion*, Rowman & Littlefield, New York.
- Giesen, W., & Sari, W. N 2018, *Tropical Peatland Restoration Report: The Indonesian Case. Technical Report February*, Berbak Green Prosperity Partnership/ Kemitraan Kesejahteraan Hijau (Kehijau Berbak), Millennium Challenge Account-Indonesia.
- Goib, B.K, et al. 2018, *Restorasi Gambut, Peningkatan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan: Dapatkah Kita Meraih Semuanya*, Seri Tata Kelola Gambut, diakses 22 Februari 2020, <https://wri-indonesia.org/id/blog/restorasi-gambut-peningkatan-kesejahteraan-dan-pemberdayaan-perempuan-dapatkah-kita-meraih>.
- Handoyo, Rochmayanto, Nurfatriani, N, & Charity, D 2018, *Pemetaan Hidden Population Terkena Dampak dan Valuasi Ekonomi Kerugiannya: Sebuah Tinjauan Ekonomi Politik atas Praktik Penguasaan Sumberdaya Hutan dan Lahan di Indonesia*, Laporan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim, Bogor.

Horkheimer, M 1972, *Critical Theory, Selected essays*, Continuum, New York.

Leonardo, Z 2004, "Critical Social Theory and Transformative Knowledge: The Functions of Criticism in Quality Education", *Educational Researcher Journal* Vol. 33 issue 6, h. 11-18.

Miettinen, J., & Liew, S.C 2010, "Status of Peatland Degradation and Development in Sumatra and Kalimantan", *Ambio Journal* Vol. 39, h. 394-401.

Noorinayuwati & Saragih, S 2013, *Kearifan Lokal Petani dalam Pengelolaan Lahan Gambut*, Balai Penelitian Lahan Rawa (Balitra), Banjarbaru.

Ortner, S 1974, "Is Female to Male as Nature is to Culture?", *Women, Culture, and Society*, h.68-87, Stanford University Press, Stanford.

Page S., Rieley J 2016, "Tropical Peat Swamp Forests of Southeast Asia", *The Wetland Book*, Springer, Dordrecht.

Sari, N., Yunus, R., & Suparman 2019, "Ekofeminisme: Konstruksi Sosial Budaya Perilaku Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *PALITA: Journal of Social-Religion Research*, Vol. 4, No. 2, h. 161-178.

Sharnappa, P.S 2016, "Reconstructing Ecofeminism: A Study of Kamala Markandaya' Snectarinassieve", *Cogent Social Sciences Journal*, Vol. 2 No. 1.

Sofyudin, M., Rahmanulloh, A., & Suyanto 2012. "Assessment of Profitability of Land Use Systems in Tanjung Jabung Barat District, Jambi Province, Indonesia", *Open Journal of Forestry*, Vol. 2(4), h. 252-256.

Soemantri. G.R 2005, "Memahami Metode Kualitatif", *Makara, Sosial Humaniora* Vol. 9. No.2, h. 57-65.

Shiva, V 2010, *Staying Alive Women, Ecology and Survival in India*, Women Unlimited, New Delhi.

Shiva, V 2012, *Biopiracy*, Natraj, New Delhi.

Tata, H.L et al. 2015, *Jelutung Rawa: Teknik Budidaya dan Prospek Ekonominya*, World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program, Bogor.

Trejo-Mathys, J 2008, "The Idea of a Critical Social Theory: Past, Present and Future", *Civitas Porto Alegre* Vol.8. No. 1, h. 19-45.

Xu, J., Morris, P.J. Liu, J & Holden, J 2018, "PEATMAP: Refining Estimates of Global Peatland Distribution Based on a Meta-Analysis", *Cattena*, Vol. 160, h. 130-140.

"Upaya Menjaga Lahan Gambut Papua" 2017, Mongabay, 4 Juni, diakses pada 22 Februari 2020, <https://www.mongabay.co.id/2017/06/04/upaya-menjaga-lahan-gambut-papua/>

### Catatan Akhir

1. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan Epistema Institute dengan dukungan dana dari IDLO (International Development Law Organization).
2. Pimpinan IDLO (International Development Law Organization), sebuah lembaga donor internasional yang mendanai proyek 'pengembangan pemberdayaan hukum masyarakat dalam ekosistem gambut untuk peningkatan akses pada keadilan (2017-2019)', yang terkesan dengan produk komunitas gambut tersebut.



## **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

1. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)
2. Dr. Widjajanti Santoso (Indonesian Institute of Sciences)
3. Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
4. Elisabet Kuswijayanti M. Si. (Indonesia)
5. Ikhaputri Widiyantini, M. Si. (Universitas Indonesia)
6. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jati Padang, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12540  
INDONESIA  
Phone/Fax: +62 21 22701689

